

Paradigma dalam Arkeologi Maritim ¹

Mundardjito

ABSTRACT *This paper is based on a maritime archeological research that grounds itself on the preservation of archeological artefacts and maritime culture. Research on a number of drowned ships at the bottom of the sea and their cargo reveals the relationship between maritime culture and living regional communities. As a new paradigm in maritime archeology, its aim needs to be commensurate with the aim of the conservation efforts which is the empowerment of the communities themselves, and the communities outside of them, and needs to be oriented toward the interests of identity nurturance, development, and economy.*

KEYWORDS *maritime archeology, new paradigm archeology, maritime culture, community conservation*

Dalam banyak tulisan kepurbakalaan di media massa, kita sering disugahi informasi tentang temuan arkeologis yang digambarkan secara mengagumkan, serba unik dan eksotik. Apalagi jika penyampaian tulisan yang memesona pembaca itu dibumbui dengan suatu riwayat penemuan yang dramatis. Pameran keliling kubur *Tut-ankh-amen* dari Mesir misalnya, yang ditemukan oleh Howard Carter, telah menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat harus antri berjam-jam di museum hanya untuk melihat benda purbakala yang dipamerkan itu dalam beberapa menit saja. Inilah salah satu contoh dari hasil pengemasan media massa yang juga mengagumkan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penemuan-penemuan yang spektakuler semacam itu amat jarang terjadi. Banyak ahli arkeologi, yang bekerja keras sepanjang karir profesionalnya, tidak pernah menemukan hal yang dapat digolongkan ke dalam kelas “memesonakan” atau “mengagumkan”. Para arkeolog tidak akan berhenti bekerja, sekalipun tanpa temuan yang spektakuler, karena motivasinya tidak didorong oleh semata-mata nilai kekaguman, nilai keindahan, dan nilai ekonomis, melainkan terutama oleh nilai informasi budaya dari penemuannya itu. Informasi budaya masa lalu yang hendak dicapai itu berkenaan dengan unsur-unsur: sistem pengetahuan,

¹ Makalah telah disampaikan dalam Lokakarya *Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam*, tanggal 28 Juli 2003 di Museum Nasional, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam. Tulisan ini mendapat sedikit perubahan untuk kebutuhan *Jurnal Wacana* FIB UI.

sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian, dan bahasa.

Di Indonesia kita juga pernah disuguhi berita tentang penemuan spektakuler Michael Hatcher tahun 1986 berupa 126 batang emas lantakan seberat 50 kg dan 160.000 benda keramik Cina yang diangkat dari dasar perairan Riau--setelah 235 tahun lamanya tersimpan di dasar laut--dari sebuah kapal kargo VOC Geldermalsen yang karam pada tahun 1751. Peristiwa pengangkatan benda-benda cagar budaya itu telah membangunkan kita dari tidur lama bahwa di dasar laut Indonesia tersimpan benda-benda budaya yang ditinjau dari segi ekonomi amat tinggi nilainya. Itulah sebabnya, baik Pemerintah maupun dunia swasta tersedot perhatiannya karena penjualan di balai lelang internasional Christy's ketika itu menghasilkan uang sejumlah 18 juta dollar Amerika (nilai pada 17 tahun yang lalu).

Namun, kita tidak boleh lupa pada konsep pelestarian benda cagar budaya bahwa pemanfaatan benda purbakala itu tidak hanya untuk kepentingan ekonomis semata, tetapi justru yang lebih utama ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, temuan Hatcher itu--yang dikenal kemudian dengan The Nanking Cargo--tidak pernah dipamerkan di museum-museum di Indonesia dengan tujuan menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat kita, padahal benda cagar budaya itu ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Tidak ada arkeolog Indonesia yang ikut serta dalam tim "eksplorasi" Hatcher sehingga tidak menambah pengetahuan dan pengalaman apapun bagi para arkeolog kita. Tertutup kemungkinan pula bagi arkeolog di masa depan untuk melakukan penafsiran atau penafsiran-ulang (*reinterpretation*) atas temuan di situs dasar laut itu, padahal hal itu biasa dilakukan bilamana di kemudian hari timbul teori dan metodologi baru. Demikian pula kita tidak memperoleh keuntungan ekonomis apapun dari hasil pelelangan tersebut. Indonesia tidak beruntung.

Peristiwa ini memicu Pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang belum dipikirkan sebelum itu. Tiga tahun kemudian melalui Keppres 43 Tahun 1989, tanggal 14 Agustus 1989 dibentuklah Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam untuk mengatasi masalah itu, yang kemudian diikuti dengan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Keppres yang diterbitkan Panitia Nasional (Kep 4/PN/BMKT/12/1989), dan Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Benda Berharga Khususnya yang Berhubungan dengan Benda Cagar Budaya di Wilayah Perairan Indonesia yang diterbitkan sebagai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (No. 0843/O/1989). Sudah tentu imbas dari tindakan Hatcher dan terbitnya Keppres beserta peraturan pelaksanaannya itu membuka peluang besar bagi para pengusaha yang memiliki naluri bisnis.

PERKEMBANGAN ARKEOLOGI

Arkeologi dilahirkan dan berkembang dari *antiquarianism* Eropa, khususnya *Renaissance* Italia, yang diwujudkan dalam upaya pencarian dan penemuan tinggalan monumen-monumen purbakala. Kegiatan tersebut melahirkan gambaran mengenai beraneka ragam kebudayaan di dunia, yang kemudian menjadi inti dari kajian ilmu arkeologi dan antropologi. Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah konsep yang lebih luas yaitu bahwa perbedaan bentuk kebudayaan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan waktu, tetapi juga oleh perbedaan ruang (geografik). Dalam masa sekitar tahun 1492-1840 arkeologi belum merupakan suatu disiplin ilmiah, dan banyak spekulasi yang disusun dari belakang meja (*armchair speculation*). Pada umumnya dalam masa spekulatif ini data arkeologi diperoleh dari kegiatan para *antiquarian* (peminat barang antik) yang menyurvei dan menggali situs tanpa rencana penelitian, serta dari *looters* yang melakukan penggalian-penggalian liar.

Dari pandangan *antiquarianism* tersebut di atas, lahirlah kemudian pemikiran arkeologi yang sistematis seperti: perkembangan kebudayaan manusia yang disusun atas dasar “Sistem Tiga Zaman” dari Christian Thomsen (bahwa kebudayaan berkembang secara unilineal dari zaman batu, lalu zaman perunggu, dan akhirnya zaman besi), dan “Hukum Worsaae” (bahwa benda-benda yang terkuburkan bersama-sama dalam satu kubur merupakan benda-benda yang dipakai pada waktu yang sama, karena itu pertanggalannya juga sama). Dalam masa klasifikasi-deskriptif ini sekitar tahun 1840-1914 terdapat perubahan sikap dan cara pandang arkeolog yang berusaha menjadikan arkeologi sebagai disiplin yang sistematis dan saintifik.

Dalam masa berikutnya sekitar tahun 1914-1940 para arkeolog memberi perhatian kepada kronologi dengan menerapkan “Teori Deposisi Stratigrafik” (Lyell) dan “Teori Evolusi Biologis” (Darwin), yang kemudian berkembang kepada “Teori Evolusi Budaya” dan “Teori Evolusi Masyarakat” (Tylor dan Morgan). Dalam masa “klasifikasi-historikal” ini muncul apresiasi terhadap sains dengan rasionalismenya, yaitu ketika kegiatan industrialisasi di Eropa dan Amerika mulai berkembang. Banyak kegiatan arkeologi-lapangan diselenggarakan dalam jangka waktu panjang, sehingga lahirlah ahli-ahli arkeologi yang profesional. Kronologi dapat dicapai lebih baik karena pengurutan tarikh dari benda-benda arkeologi (*seriation*) dikaitkan dengan hasil kajian stratigrafi. Tipologi dan klasifikasi yang sudah dimulai dalam masa sebelumnya, sekarang dikaitkan dengan metode stratigrafik dan seriasi.

Sekitar tahun 1940-1960 hubungan dimensi bentuk-ruang-waktu mulai dikembangkan, dan para peneliti berupaya mencari jejak-jejak dari difusi budaya yang pernah terjadi. Berkembanglah sekurang-kurangnya tiga macam pendekatan utama yang ada dalam masa ini:

1. Pendekatan yang menganggap bahwa artefak seyogianya difahami sebagai benda materi dalam suatu sistem perilaku budaya masyarakat, sehingga perhatian para ahli arkeologi terpusat pada kajian terhadap konteks temuan di dalam situs arkeologi (*in situ*) untuk mencapai kesimpulan

- fungsional. Fungsi suatu benda dapat ditafsirkan secara benar jika dikaji dalam konteks temuan-temuan lain (*associated finds*) di dalam suatu situs (*conjunctive approach* dari W.W. Taylor). Dalam kajian konteks-fungsional diperlukan pula bantuan ilmu-ilmu lain (*multidisciplinary*), termasuk sains seperti geologi, geografi, botani, biologi, analisis bahan, kimia, dan metalurgi untuk mengetahui tempat asal dari barang komoditas dan proses pembuatan artefak. Di atas semua itu penemuan pertanggalan mutlak dengan radiocarbon (C-14) adalah yang teramat penting.
2. Pendekatan yang beranggapan bahwa hubungan antara kebudayaan dan lingkungan alam adalah penting, maka dalam kajian arkeologi para arkeolog mengaitkan aspek budaya manusia dengan aspek sumber daya alam (*cultural ecology*), yang mengawali pendekatan ekosistem (*ecosystem*) yang muncul kemudian.
 3. Pendekatan yang beranggapan bahwa pola permukiman merupakan kunci yang penting untuk memahami adaptasi sosio-ekonomik dan organisasi sosio-politik, serta cara manusia mengatur dirinya di permukaan bumi berkaitan dengan bentuk alam dan komunitas lain di sekitarnya. Dalam masa ini para ahli arkeologi berupaya untuk melakukan rekonstruksi lebih rinci mengenai cara-cara hidup dari kelompok manusia, dengan memperhatikan fungsi serta hubungan antara kebudayaan dan lingkungan fisik, dan setelah itu perkembangannya diarahkan kepada berbagai upaya untuk memahami struktur sosialnya.

Dalam tahun 1950-an terdapat ketidakpuasan dalam hal cara penelitian arkeologi itu diselenggarakan. Ketidakpuasan ini tidak ditujukan kepada pelaksanaan teknik ekskavasi, melainkan kepada cara menarik kesimpulan suatu penelitian, cara arkeolog menerangkan hasil penelitian, serta prosedur yang digunakan dalam penalarannya. Ketidakpuasan yang paling mendasar disebabkan oleh kenyataan bahwa kesimpulan penelitian tidak pernah menerangkan sesuatu, tetapi dikaitkan misalnya dengan konsep migrasi manusia dan mengenai pengaruh-pengaruh budaya yang diperkirakan.

Dalam tahun 1960-an muncul kembali konsep evolusi yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Timbul perhatian kepada teori sistem dalam arkeologi, konsep ekosistem, dan teknik statistik serta peranan komputer. Demikian pula penggunaan penalaran deduktif, dan filsafat ilmu pengetahuan yang beraliran positivisme mengemuka dalam masa ini. Muncul satu gerakan ilmiah baru yang dikenal dengan nama '*New Archeology*', yang perspektifnya dapat kita lihat dari tiga sikap dasar yang melatarinya. Pertama, memberi tekanan perhatian kepada penggambaran proses budaya. Kedua, memiliki optimisme yang besar terhadap kemungkinan berhasilnya eksplanasi prosedural, dan tercapainya hukum dinamika budaya. Ketiga, mereka menganggap bahwa arkeologi harus juga relevan dengan permasalahan dunia masa kini.

Dari ketiga sikap yang melatari pandangan mereka itu kita dapat menelusuri pendekatan utamanya sebagai berikut: (1) pendekatan evolusioner

atau yang berperspektif sejarah; (2) pendekatan sistemik dari kebudayaan dan masyarakat yang berasal dari teori *general systems*; (3). pendekatan penalaran deduktif. Aspek-aspek lain dari *New Archeology* merupakan perluasan dari ketiga pendekatan dasar tadi dalam memandang data arkeologi. Pendekatan evolusioner memungkinkan timbulnya anggapan bahwa aspek tekno-ekonomik dari kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling utama di dalam perubahan, sedangkan faktor sosial dan ideologi datang kemudian. Hal ini berbeda misalnya dengan pendekatan *historical development* dari Willey dan Phillips yang tidak mengusahakan kajian kausalitas. Dalam masa ini proses budaya merupakan tujuan pokok arkeologi, dan untuk kepentingan kajiannya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain.

Di Amerika Serikat Lewis R. Binford menawarkan pendekatan baru terhadap masalah interpretasi arkeologi. Binford dan kawan-kawan menyadari adanya potensi yang besar dari bukti arkeologi untuk penelitian aspek sosial ekonomi dari masyarakat masa lalu. Pandangan mereka lebih optimis daripada arkeolog sebelumnya. Mereka mengusulkan agar penalaran arkeologi harus eksplisit. Penarikan kesimpulan tidak hanya didasarkan atas otoritas seseorang dalam menyusun interpretasi tetapi harus didasarkan atas kerangka argumentasi yang logis, eksplisit, serta harus terbuka untuk diuji oleh orang lain. Mereka berusaha menerangkan (*explanation*) dan bukan hanya memerikannya (*explication*) secara sederhana. Oleh karena itu, harus disusun generalisasi yang sah. Mereka menghindari pembicaraan mengenai pengaruh dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Sebaliknya mereka lebih cenderung untuk menganalisis suatu kebudayaan sebagai sistem yang dipecah ke dalam beberapa subsistem atau unsur-unsur budaya. Hal ini memberi kemungkinan untuk mengetahui hal-hal tentang mata pencaharian, teknologi, subsistem sosial, subsistem ideologi, perdagangan, demografi dan lain-lain. Mereka kurang memberi penekanan pada kajian tipologi artefak dan klasifikasi. Demikianlah, mereka sebenarnya menyiapkan penggunaan pendekatan ekologi yang sudah ada sejak tahun 1950-an secara lebih tertib.

Untuk mencapai tujuan ini pendekatan sejarah agak dijauhi, sebaliknya "ilmu-ilmu keras" didekati. Hal semacam ini juga terjadi di Inggris, seperti dikemukakan oleh David L. Clarke yang menghendaki penggunaan teknik kuantitatif dalam penelitiannya, sehingga dimungkinkan untuk menggarap himpunan data yang besar secara statistik dengan bantuan komputer untuk pengujian signifikansi misalnya, bukan dengan pendekatan kualitatif yang sederhana. Demikian pula diusahakan memperoleh gagasan dari disiplin lain, terutama geografi.

Para ahli arkeologi dari aliran ini berpendapat bahwa arkeologi haruslah menunjukkan peranannya dalam upaya menjelaskan perubahan budaya yang terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu, kegiatannya dipusatkan pada upaya eksplanasi, bukan hanya pada deskripsi yang menghasilkan rekonstruksi sejarah kebudayaan dan rekonstruksi cara hidup. Untuk dapat menerangkan proses perubahan budaya diperlukan teori yang eksplisit. Penjelasan yang

diupayakan seharusnya ada dalam rangka proses budaya, yang dapat menerangkan bagaimana perubahan sistem ekonomi dan sosial telah terjadi pada masa lalu.

Prosedur penelitian yang dilakukan didasarkan pada penalaran deduktif, yaitu yang diawali dengan perumusan hipotesis, penyusunan model, dan deduksi; tidak sekadar melakukan "*piecing together the past*". Kesimpulan yang ditarik dengan cara menguji hipotesis merupakan prosedur yang dianggap sah, bukan atas dasar otoritas atau senioritas seorang peneliti.

Fokus penelitian harus dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik secara efisien. Penelitian tidak diselenggarakan hanya atas dasar tujuan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, yang dalam kenyataannya mungkin tidak relevan dengan tujuan penelitian. Sikap mereka lebih positif dalam menghadapi penelitian yang rumit sekalipun, dan menganggap bahwa masalah arkeologi tidak dapat dipecahkan apabila mereka tidak pernah mencoba melakukannya. Mereka lebih optimis dan tidak bersikap pesimis terhadap keterbatasan data arkeologi (secara kuantitatif dan kualitatif) untuk merekonstruksi sistem sosial dan sistem ideologi masyarakat masa lalu

Dalam tahun 1960–1970 makin banyak data dan interpretasi arkeologi yang baru. Pandangan yang sudah ada dalam masa 1960-an tetap diteruskan dan ternyata mempengaruhi perubahan sikap dari kebanyakan arkeolog. Perubahan sikap ini tercermin dalam upaya menghubungkan antara tujuan untuk memahami proses budaya dengan tujuan merekonstruksi sejarah kebudayaan, sehingga perbedaan di antara keduanya makin berkurang.

Dalam masa ini paradigma *New Archaeology* mempengaruhi perkembangan *Historical Archaeology*, yaitu dari sifatnya yang partikularistik kepada pandangan yang lebih luas sebagaimana dianut dalam *Anthropological Archaeology*. Perpindahan tekanan perhatian ini disebabkan oleh dua faktor: (1) ahli arkeologi-sejarah mulai menyadari pentingnya data yang partikularistik itu dikendalikan dengan cermat untuk dievaluasi serta disumbangkan kepada metodologi perekaman data dan interpretasi untuk kepentingan penyusunan teori; dan (2) pertumbuhan yang cepat dari kajian manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*), yang seringkali meliputi situs prasejarah dan sejarah, telah menyebabkan arkeolog berlatar belakang antropologi memahami masalah arkeologi sejarah. Dengan demikian teori-teori antropologi masuk pula ke dalam studi arkeologi-sejarah (South 1977). Arkeologi-sejarah di Amerika dengan demikian memberi sumbangan juga pada perkembangan metode arkeologi dan teori perubahan budaya.

Apabila dalam awal tahun 1960 mulai diperkenalkan gagasan *New Archeology* dan pada masa berikutnya gagasan itu diterapkan dalam sejumlah besar penelitian dengan berbagai topik, maka dalam periode 1970-an berkembanglah penemuan-penemuan baru dalam bidang metodologi dan teori. Banyak sekali kajian yang menggunakan teori tingkat rendah dan tingkat menengah yang diperlukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam rangka upaya memahami sebab-sebab terjadinya perubahan budaya.

Penelitian semacam itu menghasilkan konsep yang dibutuhkan dalam usaha menghubungkannya dengan teori tingkat tinggi. Di antara teori rendah dan tengah yang kita kenal misalnya adalah kajian Schiffer (1976) yang berkenaan dengan proses formasi budaya (*cultural formation process*) dan formasi bukan-budaya (*non-cultural formation process*) yang berpangkal pada konsep bahwa tinggalan arkeologi dan struktur persebarannya merupakan pencerminan yang terganggu dari sistem perilaku manusia masa lalu. Oleh sebab itu, tafsiran arkeologi atas dasar konsep *in situ* perlu dikaji lebih kritis dengan memperhatikan proses-proses transformasi yang pernah terjadi di suatu situs .

Setelah tahun 1970-an perkembangan arkeologi pada dasarnya tidak bergeser banyak dari pandangan *New Archeology*, dan tetap berfokus pada penelitian prosesual. Baru pada akhir-akhir ini ada pandangan baru yang sering disebut sebagai pascaprosesual (*post processual*). Sebagaimana diketahui penelitian arkeologi prosesual didasarkan atas metodologi penelitian deduktif yang menggunakan rancangan penelitian formal sebagai awal, perumusan hipotesis yang eksplisit dan yang dapat diuji, serta menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Seringkali hipotesis awal dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui strategi induktif sejarah kebudayaan. Dua pendekatan yaitu deduktif-nomologikal dan sistem-ekologikal termasuk golongan pendekatan arkeologi prosesual. Dalam pendekatan deduktif-nomologikal digunakan metodologi formal saintifik yang didasarkan pada *general laws*, yang menganggap bahwa dunia ini terdiri dari gejala yang mampu kita amati, dan bergerak dengan cara yang teratur. Dengan kata lain dunia dapat dijelaskan dengan prediksi atas serangkaian gejala yang menunjukkan keteraturan tertentu. *General laws* (yang menguasai pula perilaku manusia) yang diterapkan para arkeolog diambil dari disiplin antropologi dan ilmu sosial lainnya. Meski demikian, kini ada juga arkeolog yang menolak asumsi bahwa *general laws* itu ada, dan bahwa metode saintifik deduktif dari ilmu fisika dan sains lainnya tidak tepat digunakan untuk data arkeologi. Pendekatan sistem-ekologikal berusaha mengkaji cara berfungsinya sistem-sistem budaya, baik secara internal maupun terkait dengan faktor eksternal seperti lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada tiga model perubahan budaya yaitu: (1) model *systems*, yang berpangkal pada teori *general systems*; (2) model ekologi budaya, yang melahirkan model interaksi yang rumit antara kebudayaan dengan lingkungan; dan (3) model evolusi budaya multilinier, yang menggabungkan dua pendekatan tersebut di atas ke dalam satu teori evolusi budaya yang kumulatif dalam jangka waktu panjang melalui adaptasi yang kompleks terhadap lingkungan.

Akhir-akhir ini terdapat sejumlah arkeolog yang memberikan reaksi terhadap pendekatan evolusioner dan fungsional yang dikembangkan dalam arkeologi prosesual. Mereka sering digolongkan sebagai arkeolog pascaprosesual, namun menurut Willey dan Sabloff pendekatan ini masih dapat digolongkan ke dalam jalur *New Archeology* yang tetap berupaya

mencapai eksplanasi, bukan sekedar deskripsi. Arkeologi pascaprosesual berkembang ke dalam apa yang dinamakan Hodder sebagai arkeologi struktural (*structural archaeology*), atau arkeologi kognitif (*cognitive archaeology*), yang terutama memberi peran kepada idea (gagasan) dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan arkeologi diciptakan oleh para pendukungnya (*social construct*), sehingga perlu dipertanyakan apakah penjelasan kita sekarang sudah benar (pendekatan emik). Arkeologi struktural berupaya menganalisis pola-pola kebudayaan (seperti pendekatan normatif) dan transformasinya. Pola-pola kubur di pemakaman kuna bukan sekedar pencerminan dari perilaku dan pola masyarakat, tetapi merupakan struktur dalam konteks simbolik. Arkeologi kognitif ini menganalisis pola-pola yang terletak jauh di belakang kebudayaan materi.

Bentuk lain dari arkeologi pascaprosesual yaitu arkeologi kritis (*critical archaeology*). Arkeologi kritis berasumsi bahwa ahli arkeologi adalah aktor dalam kebudayaan kontemporer, karena itu mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat sekarang. Rekonstruksi masa lalu yang disusun arkeolog harus mempunyai fungsi dalam masyarakat sekarang. Demikianlah arkeologi kritis berupaya mengkaji pola yang berada di belakang kebudayaan materi yang dipelajarinya dan yang berkaitan dengan konteks masa kini. Banyak kajian arkeologi kritis yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman golongan masyarakat yang semula tidak diperhitungkan (*class interest*) seperti golongan tertindas, orang Negro, perempuan, dan sebagainya.

Para ahli arkeologi di dunia kini sependapat bahwa ilmu arkeologi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: (1) rekonstruksi sejarah kebudayaan; (2) rekonstruksi cara hidup masyarakat masa lalu; dan (3) penggambaran proses-proses budaya.

TUJUAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan tujuan pokok yang pertama, para arkeolog berusaha mencari, menemukan, mengenali temuannya, dan mendeskripsikan bentuk-bentuk temuannya secara verbal dan piktorial, baik yang masih utuh dan setengah utuh maupun fragmentaris. Dengan menempatkan bentuk-bentuk temuan pada peta, baik yang bentuknya serupa maupun berbeda, serta menyusunnya berdasarkan, maka akan tergambar satu persebaran dari bentuk-bentuk tinggalan arkeologi tersebut dalam satuan ruang dan waktu. Tiga dimensi yaitu bentuk-ruang-waktu adalah, pertama, beberapa unsur penting dalam mencapai tujuan pokok penelitian arkeologi .

Dalam mencapai tujuan kedua, yaitu menyusun kembali cara hidup masyarakat masa lalu, para arkeolog memusatkan perhatian pada aspek fungsi, dengan cara menganalisis bentuk-bentuk tinggalan arkeologi, serta hubungannya satu sama lain di dalam konteks temuannya. Dengan cara ini, dan disertai dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sumber etnografi, sumber sejarah (data tekstual), dan mungkin dari hasil eksperimen,

maka dapatlah diketahui antara lain kebiasaan, tingkah laku sosial, sistem nilai, dan kepercayaan dari masyarakat masa lalu.

Akhirnya dalam mencapai tujuan pokok ketiga, para arkeolog berusaha memahami proses budaya yang terjadi untuk dapat menafsirkan bagaimana dan mengapa kebudayaan masa lalu mengalami perubahan-perubahan bentuk dan perubahan arah, serta seberapa cepat perubahan atau perkembangannya. Dengan tujuan yang ketiga ini, jelaslah bahwa arkeologi tidak hanya menekankan perhatiannya pada "apa", "di mana", dan "bilamana", tetapi juga "bagaimana" dan "mengapa", yang jauh lebih sulit untuk dijawab tanpa penelitian yang sistematis-ilmiah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan arkeolog bukan hanya mencari dan menemukan benda, tetapi menemukan segala keterangan yang luas mengenai manusia melalui kajian atas benda tersebut. Demikianlah ungkapan Sir Mortimer Wheeler: "*We are not digging up things, but people*", terasa menjadi makin bermakna dalam pergeseran konsep yang semula berpusat pada benda, kemudian beralih pada manusianya. Bahkan kini orang berpendapat bahwa konsep tujuan akhir arkeologi bukanlah benda semata dan bukan pula manusia yang membuat dan memakai benda itu, tetapi "*the systems behind the things and the people*", yang mencakup sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi.

Arkeolog tidak menggarap datanya dari aspek politis dan budaya saja, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya memperhatikan kegiatan para penguasa kerajaan, tetapi juga rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih banyak. Bukan hanya keraton-keraton yang megah, tetapi juga pemukiman penduduk biasa yang sebenarnya lebih melimpah. Bukan candi dan bangunan besar lainnya saja, melainkan juga pecahan tembikar yang tersebar di lahan pemukiman manusia, yang sama sekali dirasakan tidak agung dan tidak indah. Objek yang dikaji bukan hanya benda berupa alat, tetapi juga berbagai unsur komponen lingkungan hidup masyarakat seperti: tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta tanah dan air yang mempunyai relevansi dengan kehidupan manusia.

ARKEOLOGI MARITIM

Pengetahuan mengenai perkembangan peradaban atau kebudayaan manusia tidak hanya dapat diketahui melalui data yang dapat diungkapkan dari bukti tertulis sebagaimana yang dipelajari oleh ahli sejarah, tetapi juga dari bukti berupa benda yang ditekuni oleh ahli arkeologi. Sementara pengetahuan mengenai kebudayaan dari masyarakat secara menyeluruh dipelajari oleh ahli antropologi. Ilmu sejarah, arkeologi dan antropologi adalah ilmu-ilmu bersaudara (*sister disciplines*) yang berupaya mempelajari kebudayaan dalam arti luas, baik secara diakronis maupun sinkronis. Sejarah pelayaran atau perdagangan maritim masa lalu misalnya tidak akan lengkap tanpa kajian atas sejumlah kapal tenggelam dan benda muatannya serta kebudayaan maritim dari komuniti-komuniti yang kini masih hidup.

Penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan atas benda masa lalu yang berada di dasar laut, danau, dan sungai dalam lingkungan keilmuan ditangani oleh para ahli arkeologi. Dari segi teori dan metodologi sebenarnya penelitian arkeologi di daratan secara prinsip tidak berbeda dengan di dasar perairan. Demikian pula tujuan umum dari penelitiannya. Perbedaannya hanya terletak pada teknik dan peralatan penelitiannya mengingat temuannya berada di dalam lingkungan air, sehingga para peneliti harus menggunakan peralatan dan perlengkapan berbeda, dan harus memiliki kemampuan fisik yang khusus. Akan tetapi, justru kekhasan dan tingkat kesulitan penanganannya inilah yang mungkin menyebabkan arkeologi Indonesia belum dapat beranjak



Arkeolog menggunakan *cetok* dan kuas, tergantung dari material yang digali. (Delgado 1997: 22)

jauh dari ketertinggalannya dengan negara lain, bahkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

Di Indonesia dikenal istilah “arkeologi bawah air” sebagai terjemahan dari *underwater archaeology*, yang cakupan pengertiannya sebenarnya sedikit lebih sempit daripada “arkeologi maritim” (*maritime archaeology*). Jika kajian arkeologi bawah air memusatkan perhatian kepada benda-benda budaya masa lalu yang tenggelam (*submerged*), maka arkeologi maritim mempelajari interaksi manusia dengan laut, danau dan sungai. Interaksi ini dipelajari dengan kajian arkeologis atas benda materi (*tangible*) dari kebudayaan maritim, yang mencakupi objek kapal, muatan kapal,

fasilitas yang ada di pantai, dan bahkan rangka manusia. Selain memusatkan perhatian kepada situs kapal karam di dasar laut, sejak tahun 1980 dipelajari juga situs kapal yang terdampar di pantai (*beached shipwreck site*), situs kubur berwujud kapal tempat meletakkan orang mati dan sejumlah bekal kuburnya (*ship burials*) seperti kapal Khufu yang banyak ditemukan di Mesir dan kapal Sutton Hoo masa pra-Viking di Norwegia. Kecuali itu dipelajari juga komunitas pesisir (seperti desa nelayan), dan daerah industri (seperti galangan kapal) yang biasa digarap oleh *shipyard archaeologist*. Adapun *nautical archaeology* lebih memusatkan perhatian kepada struktur kapal dan penggunaannya, dan merupakan bagian khusus dari kajian arkeologi maritim.

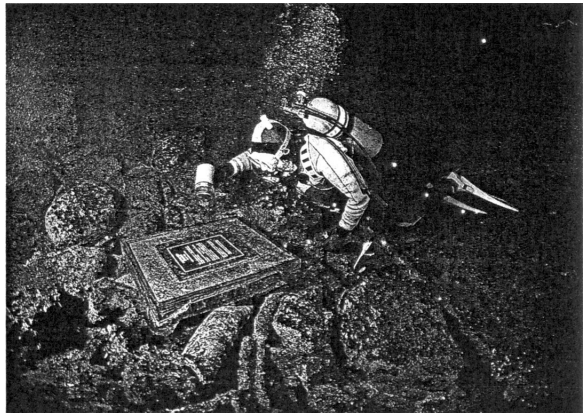
Keith Muckelroy menegaskan bahwa tujuan utama penelitian arkeologi maritim adalah manusia, bukan semata-mata kapal, kargo, peralatan, dan perlengkapan yang kita temukan. Menurutnya arkeologi maritim tidak sekadar mempelajari aspek teknologi belaka tetapi kebudayaan maritim dalam arti luas yang mengandung aspek sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Studi ini juga dapat dilakukan dengan satuan ruang penelitian

bersifat mikro, meso maupun makro (regional), dan juga yang berorientasi pada studi tematis, misalnya tentang suatu peristiwa politik atau peristiwa perdagangan. Kapal hanya merupakan satu simpul dari jaringan simpul yang berkenaan dengan sistem teknologi, sistem sosial, dan sistem ideologi. Apa yang hendak diketahui bukan hanya kapal dan muatannya tetapi manusia dan sistem budaya yang ada di belakangnya.

Dalam penelitian arkeologi maritim (Muckelroy 1978) para arkeolog memusatkan kajiannya pada beberapa hal antara lain:

1. Mempelajari proses tenggelamnya kapal (meliputi proses *filtering* seperti membuang barang-barang muatan, dan melakukan tindakan penyelamatan; serta proses *scrambling* seperti perjuangan kapal yang menabrak karang dan kemudian berlayar dalam keadaan tak seimbang sebelum tenggelam, dan hancurnya kapal di dasar laut secara perlahan-lahan). Semua ini hanya dapat diketahui dengan cara mempelajari proses pembentukan situs (*site formation processes*) sehingga dapat memberi tafsiran secara tepat dan memberi kemungkinan untuk merekonstruksi bentuk dan merekonstruksi proses karamnya kapal. Dalam kaitannya dengan penelitian tentang proses tenggelamnya kapal Bismarck misalnya, Ballard membedakan dua macam situs kapal karam yaitu: *continuous site* (tinggalan-tinggalannya terkonsentrasi di satu area seperti dicontohkan oleh Kapal Kyrenia), dan *discontinuous site* (yang tinggalan-tinggalannya tersebar).

2. Mempelajari kapal sebagai sebuah alat (sebagai alat transportasi, yang menurut Keith harus memiliki dua syarat utama yaitu: harus mampu mengambang dalam berbagai kondisi, dan dapat bergerak efisien serta dapat dikendalikan). Kemudian dipelajari juga kapal sebagai unsur dalam sistem militer serta dalam sistem ekonomi. Dalam



Seorang penyelam sedang menerangi plakat penjelasan yang ditempatkan di atas bangkai kapal Ericsson oleh UASBC (Underwater Archaeological Society of British Columbia) (Delgado 1997: 143).

hal tertentu dipelajari juga kapal upacara seperti "Kapal Khufu", kapal rekreasi seperti kapal "Royal Yacht", atau kapal untuk mancing seperti kapal "Terence Bay Wreck". Selain itu dikaji pula kapal sebagai tempat di mana hidup sebuah komunitas tertutup *closed community* (atau *shipboard society*) yang dapat diketahui melalui benda-benda yang dapat memberi keterangan mengenai cara dan gaya hidup komunitas di kapal.

Seperti diketahui di dalam kapal ada disiplin kapal dan komando yang mempertegas perbedaan antara perwira dan anak buah kapal, yang dapat menggambarkan peran dan sifat hierarki yang berlaku. Kajian ini meliputi hal yang berkenaan dengan kehidupan kapal, kesehatan, barang-barang milik pribadi, analisis rangka manusia yang mungkin menampakkan gejala trauma karena cedera atau penyakit endemik.

3. Mempelajari kebudayaan maritim masa lalu meliputi teknologi nautikal (*nautical technology*), peperangan di laut (*naval warfare*), perdagangan maritim (*maritime trade*), masyarakat kapal (*shipboard societies*) dan sebagainya. Dua pertiga bumi terdiri dari air, karena itu kegiatan berlayar merupakan kegiatan paling tua, lazim, umum, dan merata digunakan oleh banyak masyarakat di muka bumi. Temuan kapal dapat melahirkan data mengenai jenis dan teknologi perkapalan, perlengkapan dan peralatannya, jumlah dan jenis perlengkapan anak buah kapal serta penumpangnya, dan lain-lain. Kapal dapat membawa kargo yang amat beragam, bukan hanya artefak tertentu yang unik. Studi atas situs-situs kapal akan memperlengkap penelitian arkeologi daratan dan pemahaman atas kebudayaan manusia masa lalu. Kajian mengenai kargo dapat misalnya melahirkan pengetahuan tentang, tempat asal komoditas, penyebaran komoditas, jenis komoditas yang dipasarkan, komoditas yang paling banyak dikehendaki pasar, teknik pengemasan komoditas pecah belah yang penuh risiko, tipologi benda, dan sebagainya.

SUMBER DAYA BUDAYA MARITIM

Dalam upaya melestarikan sumber daya budaya maritim agaknya perlu diperjelas sumber daya budaya maritim Indonesia macam apa saja yang diperkirakan ada, dan kemudian perlu dilestarikan. Pada tulisan ini dikemukakan bahwa sumber daya budaya maritim bukan semata-mata harta karun atau keramik kuna yang nilai ekonomisnya bisa tinggi di balai lelang internasional. Agar pemahaman orang menjadi lebih jelas tentang sumber daya budaya maritim, perlulah digolongkan sumber daya budaya maritim Indonesia tersebut ke dalam tiga golongan besar yang biasanya masing-masing ditangani oleh para ahli dengan kepakaran tertentu:

1. Benda-benda arkeologis, baik yang berada di dasar laut maupun di pesisir. Benda-benda tersebut, yang dilindungi perundang-undangan tentang benda cagar budaya, biasanya digolongkan oleh arkeolog² ke dalam tiga golongan sebagai berikut:
 - a. benda buatan manusia yang dapat bergerak (*artifact*), seperti kapal, berbagai peralatan kapal, peralatan menangkap ikan, dan benda-benda muatan kapal lain (termasuk benda bertulis atau prasasti, dan benda-benda bergambar);
 - b. benda buatan manusia yang tak dapat bergerak (*feature*), seperti

² Sejalan dengan kecenderungan perhatian arkeolog kepada kebudayaan materi yang *tangible*, karena data itulah yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan data tekstual.

- pelabuhan, dermaga, mercu suar, gudang, benteng dan kanal;
- c. benda alam yang mempunyai relevansi dengan kehidupan manusia (*ecofact*), seperti hasil bumi muatan kapal, dan bentuk-bentuk permukaan bumi yang digunakan manusia sebagai acuan pelayaran, muara sungai, tempat keluar masuk selat atau teluk, sumber air tawar, dan daerah tangkapan ikan.
 2. *Artifact*, *feature* dan *ecofact*, yang bernilai sejarah tetapi yang belum dilindungi oleh perundang-undangan, baik yang berada di dasar laut maupun di pesisir. Di antara benda-benda bersejarah itu sudah tentu adalah naskah atau dokumen tertulis yang biasanya menjadi bahan kajian para sejarawan.
 3. Masyarakat yang hingga kini masih hidup di laut, dan di pantai yang biasa dipelajari oleh para antropolog. Sudah tentu selain pikiran dan perilaku para warga di dalam komuniti itu terdapat pula benda buatan manusia berupa *artifact*, *feature* dan *ecofact* yang berperan dalam kehidupan mereka.

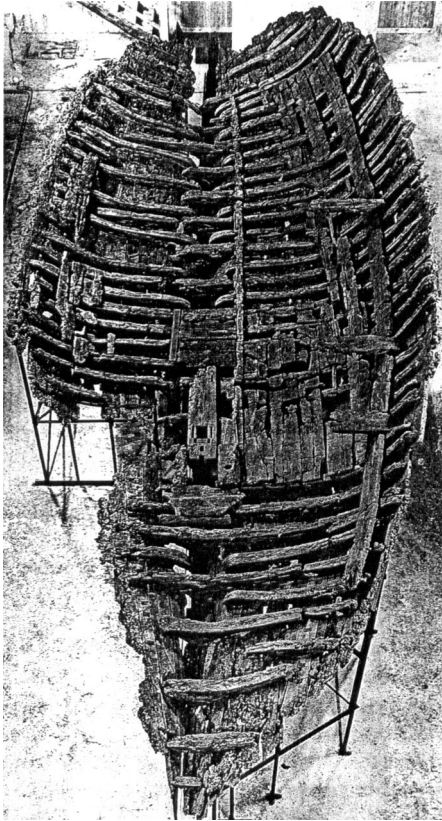


Rangka kapal Bertrand pada saat penggalian tahun 1969 (Delgado 1997: 61).

Ketiga golongan sumber daya budaya maritim tersebut di atas perlu dikaji untuk memberikan kemungkinan kepada kita mengetahui dan memahami sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi dari masyarakat pendukungnya.

KETERBATASAN DATA: KONDISI TEMUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang bentangan pantainya 81.000 km, dan luas lautnya sekitar 5,8 juta km². Perdagangan internasional, regional dan lokal telah terjadi pada masa lalu melalui jalur lintas kapal-kapal besar di lautan dan pantai. Perahu sedang dan kecil berkeliaran di sekitar pulau dan antarpulau, baik untuk memperoleh makanan maupun untuk merakit hubungan kekerabatan antarkomuniti kelautan. Dengan demikian mudah dimengerti jika di dasar laut banyak



Bangkai kapal kuno Kyrenia yang telah direstorasi di Kastil Kyrenia (Delgado 1997: 227).

kapal dan perahu yang tenggelam karena berbagai hal seperti menabrak karang, rusak, terkena badai atau dibajak perompak. Bersamaan dengan itu peralatan kapal, dan muatannya ikut tenggelam. Namun, karena pengaruh alam, tidak semua benda buatan manusia maupun benda alam turut tenggelam di dasar laut, sebagian masih lengkap dan terawat. Sisanya tentu sudah hancur. Dengan keterbatasan sumber daya budaya ini para arkeolog biasanya berusaha menjawab beberapa pertanyaan, seperti: barang apa saja yang di bawa oleh suatu kapal, berapa jumlahnya, seperti apa kualitasnya, bagaimana komposisi berbagai jenis barang muatan, dari mana tempat asalnya, dari masa apa barang-barang itu dibuat, di mana saja barang-barang itu ditempatkan di dalam kapal, akan dibawa ke mana, oleh siapa, untuk siapa, dan seterusnya.

Bentangan pantai di seluruh kepulauan Indonesia amat luas. Di pantai itulah terdapat pemukiman komuniti-komuniti yang hidup dari sumber daya alam kelautan. Para pemukim pantai ini hidup dengan alam pikiran mereka dan mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan sistem teknologi yang mungkin amat khas dan berbeda dengan komuniti lainnya. Kebudayaan mereka akan terus berlangsung melalui pewarisan keturunan secara vertikal, dan juga secara horisontal kepada warga masyarakat lain. Pewarisan itu dapat berlangsung secara lisan maupun tulisan, yang kemudian memberi kemungkinan kepada kita untuk mengenal kebudayaan yang mereka pertahankan. Sebaliknya, perubahan budaya dapat pula terjadi dengan cepat sekali akibat hubungan terbuka dan intensif dengan dunia luar. Akibatnya,

nilai budaya mereka lenyap sebelum diteliti dan direkam oleh para peneliti. Ratusan kapal Bugis 'pinisi' yang terkenal itu, pada waktu lalu pernah menjadi pemandangan umum di perairan Indonesia. Kapal yang berbobot puluhan hingga ratusan ton dan bertiang dua serta dilengkapi dengan tujuh layar sekarang sudah tidak kelihatan karena kedua tiangnya dilepas dan tidak memiliki layar lagi³. Kapal Bugis itu kini dilengkapi mesin, lambungnya dibuat lebih kokoh untuk menahan getaran mesin, sementara di buritan dibangun rumah geladak yang besar. Untung saja sudah ada penelitian mengenai pinisi sehingga sudah sempat direkam dan dapat dilestarikan nilai budayanya.

Selain beberapa pulau besar, sebagian besar dari 17.508 pulau itu adalah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Bahkan hanya 5.700 pulau yang mempunyai nama. Ada pula pulau-pulau kecil⁴ yang dihuni penduduk, meskipun jumlahnya sedikit⁵. Selain persamaan terdapat pula perbedaan budaya di antara komunitas kelautan itu yang sudah pasti menarik perhatian ilmuwan. Tetapi penelitian yang mendalam belum menyentuh sebagian besar komunitas yang menghuni pulau-pulau kecil itu. Sudah saatnya bagi kita untuk berusaha memahami dan menghargai kebudayaan yang telah mereka kembangkan sendiri dari generasi ke generasi (Lapian 1993). Salah satu bentuk penghargaan itu ialah pelestarian.

"Orang Bajau" sebagian besar hidup di laut dan bertempat tinggal dalam perahu atau rumah-perahu. Mereka berkeliaran untuk mencari nafkah di perairan dan pantai Indonesia (di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), bahkan di sebagian perairan Asia Tenggara. Mereka seringkali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga sering disebut dengan "*sea nomads*". Seperti juga Orang Bajau, ada masyarakat yang hidup di laut dan di pesisir kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan yang kita kenal dengan nama "Orang Laut". Mereka hidup sepanjang tahun di antara Laut Cina Selatan dan Laut Jawa yang menjadi arena peralihan musim, yang kadangkala terasa amat ganas. Pada musim barat mereka terpaksa berhenti mencari nafkah di laut, dan mengungsi di beberapa pulau sekitar yang lebih aman (Melalatoa 1995). Kearifan lingkungan masyarakat semacam ini perlu kita pahami termasuk komunitas kecil yang hidup di pulau-pulau kecil.

PENELITIAN SPORADIS DI INDONESIA

Penanganan sumber daya budaya di perairan Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan di negara barat (Nurhadi *et al.* 1992), bahkan dari negara tetangga di Asia Tenggara sekalipun seperti Thailand dan Filipina. Padahal luas laut Nusantara dan kedudukannya dalam lalu lintas dan jalur dagang regional dan internasional amat strategis.

³ Orang Madura masih memiliki sejumlah besar kapal "leti-leti" dengan layar segitiga untuk mengangkut barang ke Jawa dan tempat-tempat terpencil.

⁴ Digolongkan pulau kecil jika luasnya kurang dari 10.000 km².

⁵ Digolongkan sedikit jika jumlah penghuninya kurang dari 500.000 orang.

Berbagai kenyataan yang menunjukkan kelemahan dalam bidang penelitian, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya budaya bawah air telah menimbulkan permasalahan di negara kita. Kelemahan-kelemahan itu antara lain berkenaan dengan: (1) jumlah dan mutu arkeolog Indonesia yang berpendidikan arkeologi bawah air jauh dari memadai (2) pengetahuan teoritis dan pengalaman penelitian arkeologi bawah air mereka dapat dikatakan amat kurang; (3) peralatan dan perlengkapan yang memang khas dan mahal belum banyak dimiliki instansi kepurbakalaan; (4) belum ada pangkalan data tentang situs bawah air yang lengkap; (5) dana untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian amat terbatas; (6) belum ada strategi penelitian bawah air yang jelas apalagi dengan skala prioritasnya; dan (7) belum ada pengaturan penanganan yang seimbang antara kepentingan pelestarian dan



Temuan kapal karam di pantai utara Cirebon (koleksi foto pribadi).

kepentingan pemanfaatan. Keppres tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) serta SK Pannas tentang prosedur perizinan dan pengawasan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT yang lama pada saat sekarang sedang dalam proses perbaikan menuju keseimbangan dimaksud.

Dalam pada itu, situs maritim mempunyai kelebihan dalam hal daya keterawatannya yang lebih tinggi daripada situs di darat. Material dari ribuan tahun (termasuk bahan organik) dapat terawat dalam lingkungan air (*wet environment*) daripada lingkungan tanah (*dry environment*). Selain itu, kapal yang tenggelam pada dasarnya relatif aman dari gangguan manusia dibandingkan dengan di darat, dan karena itu sering dianggap sebagai *time capsules* atau *cracked time capsules*.

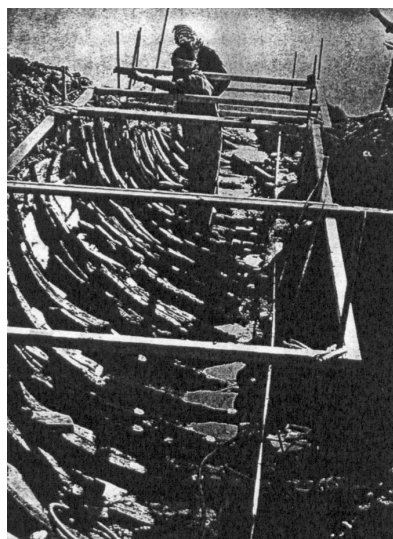
Dengan mengemukakan beberapa faktor penyebab dari kelemahan penanganan situs bawah air seperti dikemukakan di atas, maka dapatlah dimengerti mengapa amat sedikit penelitian arkeologi bawah air yang telah dikerjakan di Indonesia. Kegiatan arkeologi bawah air di Indonesia masih bersifat sporadis sehingga kegiatannya dapat dikatakan bukan merupakan *underwater archaeology* sepenuhnya melainkan hanya *underwater salvaging*. Hanya beberapa situs di daerah pantai dan daerah rawa yang digarap, bahkan sering tanpa harus menyelam karena bekerja di air dangkal dan keruh.

Selain kapal VOC De Geldermalsen yang tenggelam tahun 1752 di Perairan Riau yang diangkat Michael Hatcher 1986, dan kapal yang tenggelam di perairan pulau. Buaya berisi sekitar 30.000 keramik abad X—XIII dinasti Sung yang diangkat oleh PT Muara Wisesa, maka kegiatan yang lainnya (Soeroso 1992) antara lain: menggarap kapal (Karang Kaitan?) di Situs Kragan, 2 km dari pantai Rembang, Jateng; kapal (Karang Genting?) di Situs Bulu, 4,50 km dari pantai Tuban, Jatim yang dalamnya antara 10—12 meter (Nurhadi 1985); kapal di Situs Banjarwati, Lamongan, Jatim yang berisi keramik dinasti Ming dan fragmen kayu kapal (?); kapal utuh di Situs Bukit Jakas, P. Bintan (Manguin & Nurhadi 1987) berisi keramik Ming tahun 1460 (pertarikan karbon); kapal di Situs Kolam Pinisi, dekat S. Musi, Palembang; kapal di Situs Sambirejo, dekat S. Musi, Palembang; kapal di Situs Batanghari, Jambi; kapal di Situs Speelwijk, Banten Lama; kapal abad 12—14 di Situs Paya Pasir, di rawa pohon nipah di Kota Cina; kapal di Indramayu; dan 16 kapal di Selat Gaspar antara Blitung dan Sumatra Selatan pada kedalaman 15-30 meter (EFEO & PuslitArkenas).

PELESTARIAN SUMBER DAYA BUDAYA MARITIM

Pada dasarnya sumber daya budaya masa lalu tidak pernah lengkap. Tingkat keterawatannya rendah, bukan saja karena sebagian besar benda dibuat dari bahan yang mudah rusak tetapi juga karena pengaruh alam di daerah tropis mudah melapukkannya. Belum lagi tindakan manusia yang merusak, mencuri, memindahkan, benda tersebut. Hal itulah yang mengurangi nilai data kontekstualnya. Selain itu, nilai budaya yang ada, serta proses perubahannya tidak sempat dipelajari dan direkam dengan baik.

Sudah tentu untuk melestarikan semua itu perlu dilakukan penelitian agar dapat direncanakan sumber daya budaya dan masyarakat mana yang perlu



Pendokumentasian kapal Malcolm (Delgado 1997: 257).

diprioritaskan, dan hal apa saja yang perlu dilestarikan. Upaya pelestarian bertujuan agar masyarakat maritim terangkat ke dalam taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan cara hidupnya yang mereka jalankan selama berabad-abad. Mereka tidak harus meninggalkan jatidirinya sebagai masyarakat maritim dan mengubah kebudayaannya secara cepat. Sebaliknya, kemampuan adaptif, kecerdasan, dan ketrampilan merekalah yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat lain.

KEPERLUAN MEMPERLUAS MATERI PERUNDANG-UNDANGAN

Upaya melestarikan semua itu perlu didukung pula oleh perundang-undangan yang memadai dan implementasinya. Perangkat hukum yang ada seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tersebut, empat SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan pendaftaran benda cagar budaya tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan dan penghapusan benda cagar budaya, dan atau situs; tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya; serta tentang penelitian dan penetapan benda cagar budaya dan atau situs; serta Keppres No. 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga, banyak dinilai para pelestari tidak cukup dapat memecahkan masalah pelestarian sumber daya budaya maritim secara keseluruhan. Hal ini mungkin disebabkan oleh orientasi perundang-undangan ini tertuju pada "benda" sebagaimana nama dari undang-undangnya. Pemikiran "*artifact oriented*" semacam ini juga tersirat dalam nama panitia nasional tersebut.

Karena itu perundang-undangan yang ada perlu diusulkan untuk diperluas atau meneruskan rancangan undang-undang kebudayaan yang kalau tidak salah belum tuntas digarap. Perundang-undangan dimaksud perlu mencakupi juga hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya budaya maritim.

Sumber daya budaya maritim Indonesia yang terpilih dengan skala prioritas perlu dikelola dengan baik dan sedapat mungkin diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan bantuan pemerintah. Pengelolaannya seyogianya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sekarang dan memerhatikan kepentingan masyarakat di masa depan.

PENUTUP

Di satu pihak perkembangan penanganan sumber daya budaya maritim di berbagai negara sudah amat berkembang, sedangkan di Indonesia perkembangannya masih belum beranjak dari posisi awal. Padahal sumber daya budaya di bawah perairan Nusantara amat banyak dan kemungkinan pengambilan sumber daya itu secara ilegal masih amat mungkin, bahkan oleh orang asing. Oleh sebab itu, kita perlu memikirkan cara bagaimana masalah ini dapat ditangani. Menurut hemat penulis ini, penanganan sumber daya budaya bawah air dapat dilakukan hanya dengan cara gotong royong, secara

terpadu dan berorientasi kepada kepentingan nasional.

Agaknya tidak ada satu pihak pun di Indonesia yang mampu mengerjakannya sendiri sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, partisipasi dari berbagai lembaga pemerintah, para peneliti, para pelestari, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha perlu dipadukan secara terintegratif sehingga terdapat keseimbangan antara upaya pelestarian di satu pihak dan pemanfaatannya di pihak lain. Lembaga arkeologi bidang penelitian dapat memberi kontribusi dalam hal misalnya rancangan penelitian yang sesuai dengan kerangka penelitian arkeologi nasional. Lembaga pelestarian memberi sumbangan tentang perlindungan, konservasi benda dan penataan situs bawah air. Lembaga pendidikan mungkin dapat memberi sumbangan dalam hal pendidikan teori dan metodologi arkeologi. Angkatan Laut dapat memberikan sumbangan dalam bentuk, misalnya tenaga penyelam dan pelatihannya. Sedangkan pihak swasta, apalagi jika bergabung, dapat memberi kontribusi dalam pendanaan kegiatan. Sudah tentu semua kegiatan itu harus diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Apabila hal ini tak dapat dilakukan mungkin ada baiknya jika kita berpikir mengundang orang asing yang ahli dan berpengalaman tetapi yang bekerja di bawah pengawasan dan kendali Pemerintah sesuai dengan aturan yang ketat. Para peneliti Indonesia dapat ikut serta dalam pekerjaan itu seraya meningkatkan kemampuan dan menambah pengalamannya. Analogi untuk ini seperti dilakukan di Yunani. Di sana terdapat lembaga penelitian asing seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, dan sebagainya yang menyelenggarakan penelitian di beberapa situs di Yunani. Dalam pada itu kesempatan luas diberikan kepada peneliti Yunani untuk belajar dan menimba pengalaman di lembaga-lembaga asing yang membawa sendiri sejumlah dana, peralatan, buku, dan gagasan-gagasannya ke Yunani. Dengan demikian dalam waktu tidak terlalu lama para peneliti Yunani menjadi lebih cepat belajar dan berkembang. Tetapi mungkin yang terakhir ini merupakan alternatif kedua.

Masalah yang kiranya perlu dipertimbangkan dalam kebijakan penelitian arkeologi maritim antara lain mengenai: (1) masalah pencapaian tujuan arkeologi, (2) masalah sifat data arkeologi Indonesia yang berpengaruh pada strategi penelitian dan pelestarian, (3) masalah penelitian yang berwawasan pelestarian, pemanfaatan, dan tanggung jawab arkeologi Indonesia atas dasar etika profesional (etika maritim), serta (4) masalah strategi penelitian arkeologi di Indonesia, meliputi hal yang berkenaan dengan rancangan penelitian, satuan penelitian, pendekatan multidisipliner, teori, dan metode survei, terutama yang sesuai dengan kondisi sekarang di Indonesia.

Kegiatan pengangkatan, dan pemanfaatan benda asal muatan kapal laut harus merujuk kepada kepentingan nasional dalam rangka melestarikan sumber daya budaya. Dengan upaya pelestarian itu diharapkan sumber daya budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan memperkokoh jati diri budaya bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan ekonomi.

DAFTAR ACUAN

- Binford, Lewis R. 1962. "Archaeology as Anthropology". Dalam *American Antiquity* 28:217-225.
- Blackman, D.J., ed. 1973. *Marine Archaeology*. London, Christie's.
- _____. 1985. *The Nanking Cargo Chinese Export Porcelain and Gold European Glass and Stoneware*. Auction Catalogue. Amsterdam.
- Clarke, David L. 1968. *Analytical Archaeology*. London: Methuen.
- _____. 1977. *Spatial Archaeology*. London: Academic Press.
- Delgado, James P., ed. 1997. *Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology*. London: British Museum Press.
- Gautama, G. 2002. "Pengelolaan Benda Berharga Muatan Asal Kapal Tenggelam sebagai Benda Cagar Budaya". Makalah dibacakan dalam Seminar di Dep. Kelautan dan Perikanan.
- Linder E. and Avner Raban. 1975. *Marine Archaeology*. London: Cassell.
- Manguin P.Y. & Nurhadi. 1987. "Perahu Karam di Situs Bukit Jakas, Riau: Sebuah Laporan Sementara". Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Marx, R.F. 1975. *The Underwater Dig*. Houston Texas: Pieces Books.
- Mathers, W.M. & Michael Flecker, ed. 1997. *Archaeological Recovery of the Java Sea Wreck*. Maryland: Pacific Sea Resources.
- Muckelroy, K. 1978. *Maritime Archaeology*. Cambridge, London.
- Lapian, A.B. 1993. "Dampak Kehidupan Masyarakat Bajo terhadap Wilayah Pesisir". Makalah pada *Seminar on Characteristic of Ecotone and Its Rehabilitation in Coastal Zone*, LIPI dan Unesco pada tanggal 29 – 31 Maret 1993 di Jakarta.
- Nurhadi. 1985. Telaah Pendahuluan terhadap Beberapa Situs Arkeologi Bawah Air di *Indonesia dan Prospek Pengembangannya*. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III 1983, Jakarta: Depdikbud, 1233 – 1242.
- Nurhadi, Hari Untoro Dradjat, Soeroso MP and Halwany Michrob. 1992. *Potential, Problem and Prospect of the Development of Underwater Archaeology in Indonesia. Country Report of Indonesia*. SPAFA Workshop on Underwater Archaeological Research. Jakarta, Carita, Serang.
- Schiffer, Michael B. 1976. *Behavioral Archaeology*. New York: Academic Press.
- Soeroso MP. 1992. *Research on Ancient Ship Wreck in Sumatera. Supplementary Report of Indonesia*. SPAFA Workshop on Underwater Archaeological Research. Jakarta, Carita, Serang.
- Sudiono. 1990. "Laporan Sementara Kegiatan Gasper Project di Selat Gasper, Pulau Balitung, Sumatera Selatan". Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- South, Stanley A. 1977. *Method and Theory in Historical Archaeology*. New York: Academic Press.
- Taylor, W.W. 1974. *A Study of Archaeology*. London: Feffer & Simons.
- Unesco. 2001. *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. Paris.
- Wilkes, B. St J. 1971. *Nautical Archaeology*. Newton Abbot: David & Charles
- Willey G.R. & J.A. Sabloff. 1980. *A History of American Archaeology*. Ed. ke-2. San Fransisco: Freeman.